

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Sejarah pembentukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terjadi bersamaan dengan digulirkannya Era Otonomi daerah respon terhadap proses reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berubah dari sistem pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Wilayah NKRI dibagi dalam daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota yang bersifat Otonom, artinya daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan masing-masing berdiri sendiri serta tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal II Bidang Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Namun berdasarkan Pasal 9 Ayat, kewajiban tersebut

tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten dan Kota.

Karena itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 60, 61 dan 62 maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk perangkat daerah yang disebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang Pendidikan. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan yang diangkat oleh Gubernur Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, secara administrasi bersifat vertikal dengan nama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan sesuai tuntutan reformasi Maka berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menurut beberapa perubahan baru dan penyesuaian, pengolahan daerah otonom, salah satunya dengan adanya peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom serta peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 Tanggal 12 Desember 2000 tentang daerah Dinas Provinsi Jawa Barat kemudian disesuaikan kembali dengan ditetapkan dengan

keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas dan unit Dinas Pendidikan Jawa Barat .

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan penggabungan dari kantor wilayah departemen pendidikan nasional jawa barat yang berkantor di jalan Dr. Radjiman No.6 Bandung dan dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang berkantor di jalan Banda No.28 Bandung. Sesuai dengan kesepakatan maka kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di tetapkan di jalan Dr. Radjiman No.6 Bandung. Pendidikan adalah pilar penting dalam bangunan sebuah daerah karena salah satu parameter untuk mengukur kemajuan sebuah negara adalah pendidikan, dengan pendidikan diharapkan akan melahirkan manusia yang berkualitas dan beradaban, disini peran pemerintah sangat signifikan untuk merubah wajah pendidikan. Mengingat sangat pentingnya pendidikan maka pemerintah mendirikan intansi Dinas Pendidikan Disetiap daerah yang pengolahannya dibawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

Dinas Pendidikan Pendidikan Jawa Barat (DISDIK JABAR) Adalah sebuah intansi yang berada di bawah kewenangan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. DISDIK JABAR bertugas untuk merumuskan kebijak sanaan operasional

dibidang Pendidikan dan melaksanakan sebagian kewenangan Desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan Azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain itu DISDIK JABAR mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pendidikan.
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendidikan.
3. Pembinaan manajemen dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, dikmenjur pendidikan menengah umum dan pendidikan tinggi, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah serta UPTD.
4. Penyelenggaraan ke tata usahaan dinas.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

3.1.2.1 Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Pendidikan Jawa Barat adalah Akserasi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Cerdas dan Berakhlak Mulia Serta Menguasai Ilmu Pengetahuan, Berdaya Saing Menuju Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera.

3.1.2.2 Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

1. Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Kelembagaan Dinas Pendidikan Mewujudkan Tata Kelola Yang Prima, Akuntabel Guna Tercapainya *Good Governance* Bidang Pendidikan.
2. Meningkatkan Upaya-upaya Pemerataan Dan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu Dan Daya Saing Serta Relevansi Pendidikan

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang urusan pendidikan. Adapun tugas-tugas dari setiap bagian atau jabatan, antara lain sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- c. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program.

- d. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.
 - e. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
 - f. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan dasar.
 - g. Seksi Pembinaan TK dan SD mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan TK dan SD.
 - h. Seksi Pembinaan SMP mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMP.
 - i. Seksi Pembinaan SSN dan SBI mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SSN dan SBI.
 - j. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan menengah dan tinggi.
 - k. Seksi Pembinaan SMA mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMA.
- .

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk rancangan sistem informasi kenaikan pangkat pada bagian kepegawaian di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah metode deskriptif yaitu metode yang hanya menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai *variable*. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui metode pengumpulan data, yaitu wawancara atau metode observasi, dimana metode tersebut dapat membuat gambaran secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian tertentu.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam perancangan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan dari objek yang diteliti secara objektif.

3.2.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis dan metode pengumpulan data yang digunakan untuk membuat perancangan sistem informasi kenaikan pangkat pada bagian kepegawaian di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yaitu dengan metode pengumpulan data berupa sumber data primer (observasi, wawancara) dan sumber sekunder (dokumentasi).

3.2.2.1 Sumber Data Primer

Data primer merupakan pengumpulan data secara langsung dari objek yang sedang diteliti, cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data primer ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah cara untuk mendapatkan data dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung di lapangan, dengan melihat atau mengamati secara langsung pada instansi perusahaan yang terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Observasi yang penulis lakukan pada bagian kepegawaian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan/ *interview* secara langsung kepada bagian yang terkait tentang sistem kenaikan pangkat yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pihak yang peneliti wawancarai yaitu bagian kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang prosedur pembuatan usulan kenaikan pangkat yang dimana hasil wawancara digunakan sebagai kajian pembuatan rancangan usulan sistem informasi kenaikan pangkat yang kemudian akan diajukan sebagai sistem yang baru.

3.2.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan cara pengumpulan data dengan cara mempelajari data yang telah tersedia atau terlebih dahulu oleh pihak-pihak lain seperti buku/dokumen. Dokumen yang peneliti kumpulkan antara lain data pegawai, persyaratan kenaikan pangkat dan usulan kenaikan pangkat.

3.2.3 Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

Metode pendekatan adalah suatu cara yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam sebuah sistem, dimana cara penyelesaiannya itu menggunakan metode pendekatan sistem dan metode pengembangan sistem.

3.2.3.1 Metode Pendekatan Sistem

Metode pendekatan sistem yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan terstruktur. Dimana terdapat beberapa alasan penulis menggunakan pendekatan terstruktur diantaranya adalah mudah dipahami dan mudah digunakan, artinya metode ini mudah dimengerti, selain itu metode terstruktur telah banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi.

3.2.3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan dalam pengembangan untuk membangun sistem informasi ini yaitu metode *prototype*. Metode *prototype* merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu rancangan dengan

cepat dan bertahap serta *prototype* juga membuat proses pengembangan sistem informasi menjadi lebih baik, cepat, dan lebih mudah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *Desain Prototyping* dimana *Desain Prototyping* ini digunakan untuk perancangan sistem informasi yang diusulkan.